



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN STRATEGI OPERASIONAL PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNI PEDESAAN (PUAP) DI KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Engki Irawan

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : engkiirawan836@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kecamatan Hulu Kuantan. Teknik penentuan sampling yang peneliti gunakan Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang mana jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 53 orang. Populasi yang penulis jadikan obyek penelitian ini adalah pihak kecamatan hulu kuantan 5 orang dan Masyarakat Kecamatan Hulu Kuantan yang terlibat dan dianggap memahami mengenai Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan yang berjumlah 48 orang. Hasil sebaran kuesioner mengenai Efektivitas Pelaksanaan Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan memang Cukup baiknya Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kecamatan Hulu Kuantan yang menghasilkan nilai rata-rata 156 berarti berada pada interval Cukup Baik. Serta observasi lapangan yang menunjukkan Efektivitas Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sudah Cukup Baik, terlihat dengan adanya PUAP ini para petani yang mulai memanfaatkan lahan tidur miliknya untuk kegiatan usaha agribisnis yang akan memberikan penghasilan serta mengurangi angka pengangguran di Kecamatan Hulu Kuantan.

Keywords : Efektivitas Pelaksanaan Strategi (PUAP)

Abstract

This research was conducted in Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how the implementation of the Rural Agribusiness Development Operational Strategy (PUAP) in Hulu Kuantan District. The formulation of the problem in this research is how to implement the Rural Agribusiness Development Operational Strategy (PUAP) in Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique that the researcher uses is purposive sampling. Purposive Sampling is a sampling technique with certain considerations. The number of samples taken in this study was 53 people. The population that the author uses as the object of this research is the Hulu Kuantan sub-district 5 people and the Hulu Kuantan District community involved and considered to understand about Rural Agribusiness Development, amounting to 48 people. The results of the distribution of the questionnaire regarding the Effectiveness of Implementation of Rural Agribusiness Development Operational Strategies (PUAP) in Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency show that it is indeed quite good for Rural Agribusiness Development (PUAP) in Hulu Kuantan District which produces an average value of 156 which means it is in the Fairly Good interval. . As well as field observations that show the Effectiveness of Rural Agribusiness Development (PUAP) in Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency is Good Enough, it can be seen with this PUAP that farmers are starting to use their unused land for agribusiness activities that will provide income and reduce unemployment in the area. Hulu Kuantan District.



Keywords : Effectiveness Implementation of Operational Strategy (PUAP)

1. PENDAHULUAN

Daerah Riau yang mengalami perkembangan pesat baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun jumlah penduduk memerlukan berbagai program yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dimulai pada tahun 2008 merupakan salah satu program dari pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pendekatan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang dilaksanakan adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah program nasional yang berbentuk sebuah kerangka dan pedoman yang dijadikan acuan bagi program-program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi di dalamnya. Program-program yang termasuk kedalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) termasuk didalamnya mengenai penentuan dan pembagian wilayah tempat program-program tersebut dilaksanakan. Pedoman mengenai pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2008.

Masyarakat desa terutama kelompok-kelompok tani miskin merupakan sasaran dari Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sekaligus juga sebagai pelaku utama dari setiap tahapan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya dari aparat dan konsultan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan seterusnya lebih berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang memiliki luas wilayah agribisnis yang cukup potensial, Salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kecamatan Hulu Kuantan merupakan salah satu Kecamatan sasaran dari kegiatan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), program PUAP dilakukan dan dikembangkan agar kelompok tani yang ada lebih berdaya lagi dan dapat mengembangkan usahanya. Adapun tujuan dan sasaran dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai potensi wilayah.
- b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani.
- c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
- d. Meningkatkan fungsi kelembagaan
Sasaran Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan sebagai berikut:
 - a. Berkembangnya usaha agribisnis di desa miskin terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa.
 - b. Berkembangnya gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan petani.



- c. Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
- d. Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, dan musiman.

Untuk percepatan pembangunan pertanian memerlukan peran penyuluh pertanian sebagai pendamping dan pembimbing pelaku utama dan pelaku usaha agribisnis. Dalam melaksanakan perannya, penyuluh pertanian bertindak sebagai fasilitator agar gabungan kelompok tani (Gapoktan) mampu mengambil keputusan sendiri, dengan jalan membantu : 1) mengidentifikasi potensi wilayah; 2) mengidentifikasi dan menganalisa pasar; 3) mengidentifikasi potensi usaha; 4) mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan dan; 5) pengambilan keputusan di tingkat kelompok dan gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Sejalan dengan pola dasar program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yaitu mengembangkan usaha ekonomi produktif petani, Penyuluh Pertanian diperankan sebagai Penyuluh Pendamping bagi Gapoktan dalam melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan sesuai dengan potensi usaha ekonomi produktif di pedesaan.

Penyuluh pendamping dalam program PUAP sangat diperlukan perannya dalam mengembangkan usaha agribisnis di pedesaan yang dikelola oleh Gapoktan di lokasi PUAP. Dengan demikian agar segala aktivitas penyuluh sebagai pendamping PUAP berjalan secara produktif, efektif dan efisien.

Seiring dengan dicanangkannya Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), semua program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan sejumlah instansi pemerintah diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan potensi usaha yang dijalankan, sesuai dengan tujuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Sehubungan dengan hal tersebut program ini memfokuskan kegiatannya pada kelompok tani yang memiliki keterbatasan modal di pedesaan dan berupaya memfasilitasi pembangunan melalui pemberdayaan kelompok tani dengan melakukan sejumlah kegiatan, seperti pengembangan dan penguatan institusi lokal di tingkat Kecamatan dan desa, pendampingan langsung ke masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat lokal, dan penyediaan dana atau bantuan permodalan.

Program ini pelaksanaannya terintegrasi dengan program Permodalan Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-M). PNPM Mandiri Pedesaan dalam mengalokasikan Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) didasarkan kepada kategori kemiskinan dan tingkat kemiskinan masing-masing Kecamatan. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan sumber dana untuk melaksanakan program PNPM Mandiri Pedesaan ini yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Swadaya Masyarakat serta dari partisipasi dunia usaha.

Tujuan dari pengelolaan dana bantuan pinjaman melalui PNPM Mandiri Pedesaan ini adalah:

- a. Menyediakan dana bagi pengembangan usaha bagi yang membutuhkan modal usaha.
- b. Membuka peluang kepada masyarakat untuk mendirikan usaha bagi perbaikan ekonomi melalui penyediaan modal usaha yang mudah dan murah oleh Pemerintah Kabupaten.
- c. Meningkatkan kemampuan dan wawasan kewirausahaan masyarakat sasaran.



- d. Mendidik masyarakat untuk mengelola usahanya secara profesional dan makin akrab dengan dunia perbankan.
- e. Mempercepat pemulihan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui Bergeraknya sektor riil, khususnya strata menengah ke bawah.

Penyaluran dana PNPM Mandiri kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha pertanian di Kecamatan Hulu Kuantan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Setiap Gabungan Kelompok Usaha Tani senantiasa harus diberdayakan agar dapat bekerja dengan baik, mencapai target yang diharapkan sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Berbagai cara dilakukan agar Gapoktan memiliki kinerja yang baik, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya kinerja setiap Gabungan Kelompok Tani di Kecamatan Hulu kuantan merupakan hasil proses yang kompleks, baik berasal dari diri pribadi petani (*internal factor*) maupun upaya strategis dari kelompok tani. Faktor-faktor internal misalnya motivasi, tujuan, harapan dan lain-lain, sementara contoh faktor eksternal adalah lingkungan fisik dan non fisik kelompok tani.

Berdasarkan kondisi yang ada dilapangan terdapat beberapa gejala atau fenomena antara lain:

- a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, Petani belum bisa mandiri dalam memanfaatkan lahan yang ada di Kecamatan Hulu Kuantan.
- b. Masih belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP oleh pihak Kecamatan Hulu Kuantan karena sejauh ini pengelolaan PUAP baru dijalankan untuk perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet sehingga dampaknya dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat dan kelompok tani masih kurang menunjukkan hasil yang menggembirakan.
- c. Masih belum berjalannya optimalisasi potensi agribisnis di desa-desa miskin yang ada di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), ini ditunjukkan belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan dari hasil usaha yang digelutinya.
- d. Masih terbatasnya jumlah penguatan modal bagi Gapoktan di Kecamatan Hulu Kuantan dalam menggunakan dana PNPM Mandiri bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat/usaha tani.
- e. Sosialisasi tidak efektif, kurangnya koordinasi diantara pihak yang terlibat, lemahnya pengawasan serta ketidaktersediaan aturan atau sanksi tegas yang menjamin dana puap diberdayakan secara optimal.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menganalisa masalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kecamatan Hulu Kuantan Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan “Efektivitas Pelaksanaan Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat,



tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya. Administrasi adalah dua orang atau lebih yang bersatu guna mencapai tujuan secara bersama-sama. (Suprayogi, 2011 : 2).

Berdasarkan pengertian mengenai administrasi menurut para ahli, administrasi dapat dikatakan sebagai proses kerjasama yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan. Menurut Dwight Waldo (dalam Syafii 2003:33) mengatakan bahwa Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Menurut Edward H. Lichfield (dalam Syafii 2003:33) bahwa Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai,

Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2008 : 36-38), sebagai berikut :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (unavoidable).
Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, warga negara ataupun orang asing.
- b. Administrasi negara memerlukan kepatuhan.
Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.
- c. Administrasi negara mempunyai prioritas.
Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.
Besarnya lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.
- e. Pimpinan atasnya (top management) bersifat politis.
Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur.
Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuannya diantaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.
- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.
Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu bergabung dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas. Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2009:21)



fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*).
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*).

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Menurut Robbins dalam Edison, dkk (2016 : 49) organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly dalam Edison, dkk (2016 : 49) organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan.

Menurut Khalil dalam Edison, dkk (2016 : 49) organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan

Menurut Weber dalam Silalahi (2011:124) menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut : “Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya. Organisasi telah di deskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko dalam Edison, dkk (2016 : 54) walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama tetapi karena tujuan dan strategi organisasi yang berbeda, hal ini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda

Menurut Etzioni dalam Silalahi (2011 : 125) organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu.

Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
2. Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.
3. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Adapun elemen penting dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut : (Edison, dkk 2016 : 49)

1. Mendukung tujuan strategis



Struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tujuan organisasi, dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Selain itu dibuat ramping, efisien dan efektif dengan menggabungkan bagian-bagian yang sifat pekerjaannya tidak terlalu rumit, tapi harus dihindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan misalnya, menggabungkan bagian pengawas internal dan operasional, bagian penjualan/pembelian dengan menyimpan barang, atau bagian akunting dengan operasional.

2. Beban kerja yang rasional

Dalam organisasi harus ada pembagian fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja. Jangan sampai ada orang/jabatan tertentu memiliki beban terlalu besar sedangkan yang lainnya sangat kecil. Karena itu, sebelum melakukan pengelompokan atau pembagian bidang, perlu diperhitungkan beban kerja dari masing-masing orang/jabatan.

3. Otoritas yang jelas

Perlu adanya otoritas dan pendelegasian yang jelas agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu bergantung pada perintah-perintah semata. Dari beberapa kasus, atasan enggan melakukan pendelegasian ini dengan beberapa alasan, yaitu: (1) khawatir bawahan akan menjadi lebih baik dan menjadi pesaingnya dikemudian hari; (2) ketidakpercayaan kepada bawahan, dan/atau; (3) bawahan belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendelegasian tersebut.

4. Adanya uraian pekerjaan dan prosedur

Menyiapkan uraian pekerjaan agar ada kejelasan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, perlu adanya prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting mengatur hubungan dan kewenangan antar jabatan dan antar bagian, misalnya, prosedur pengeluaran uang, dimana isinya menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui serta otoritas yang dipenuhi. Setelah itu, barulah uang bisa dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur mempermudah penelusuran, memperjelas tanggung jawab, dan yang terpenting untuk taat asas.

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di



tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

5. Organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut

2.1.3 Teori Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektifitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar diri seorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu. Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hal yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. (Simamora 2008 : 31)

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Soewarno, 2006 : 16)

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. (Effendy, 2008 : 14)

Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. (Susanto, 2005 : 156)

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. (Sedarmayanti, 2006: 6)

Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas. efektivitas, sebagai berikut: Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi



(operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. (Kurniawan, 2005 : 109)

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak yaitu S.P. Siagian (2008:77):

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- a. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- b. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- c. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- d. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- f. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana perusahaan menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktivitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu (Sutrisno, 2007:125-126):

1. Pemahaman Program

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui sejauhmana masyarakat umum dan masyarakat pendidikan pada khususnya dapat memahami program-program bantuan beras miskin. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak.

2. Tepat Sasaran



Yaitu bagaimana kesesuaian program-program bantuan beras miskin yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran. Dalam indikator ini peneliti mencoba untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas program bantuan beras miskin indikator ini mencoba untuk mengukur bagaimana kesesuaian program-program yang telah dibuat kepada kelompok sasaran.

3. Tepat Waktu

Yaitu dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui penggunaan waktu dalam pelaksanaan program-program bantuan beras miskin, apakah sesuai dengan jadwal yang sudah dirancang atau tidak. Dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif

4. Tercapainya Tujuan

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apakah tujuan dari program-program bantuan beras miskin sudah tercapai atau belum mengingat program bantuan beras miskin sudah ada sejak lama. Pencapaian tujuan juga dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target. Sehingga suatu program dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

5. Perubahan Nyata

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apa saja dan bagaimana bentuk perubahan nyata (khususnya mengenai rumah tangga sasaran) sebelum dan sesudah adanya program. Sehingga dapat diukur melalui sejauhmana program bantuan beras miskin memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.

2.1.4 Teori / Konsep Pemberdayaan

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 12 disebutkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang sering kali mematikan kemandirian masyarakat setempat. (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 100)

Pemberdayaan merupakan proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. (Slamet dalam Mardikanto & Soebiato, 2019 : 100)

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Bertolak dari pemahaman pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan masyarakat memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :



1. Mengerjakan artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
2. Akibat artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat karena perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang.
3. Asosiasi artinya setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya. (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 105)

Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut : (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 111)

1. Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
2. Perbaikan aksesibilitas dalam sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan serta lembaga pemasaran.
3. Perbaikan tindakan diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik.
4. Perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jaringan kemitra usaha.
5. Perbaikan usaha diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
6. Perbaikan pendapatan diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
7. Perbaikan lingkungan diharapkan memperbaiki lingkungan karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
8. Perbaikan kehidupan diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
9. Perbaikan masyarakat diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan dengan tiga pendekatan meliputi : (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 161)

1. Pendekatan Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien (penerima manfaat) secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervension*. Tujuan utamanya adalah Membimbing atau melatih penerima manfaat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
2. Pendekatan Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien (penerima manfaat). Pemberdayaan dilakukan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan sikap-sikap klien (penerima manfaat) Agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Pendekatan Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*Large-System Strategy*), karena penerima manfaat perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik,



adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien (Penerima manfaat) sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 161)

Strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan tertentu atau penerima manfaat yang dikehendaki, oleh karena itu, pengertian strategi sering rancu dengan : metoda, teknik, atau taktik. Strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu : (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 168)

1. Pemihkan dan pemberdayaan masyarakat
2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat,
3. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada pasrtisipasi masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut : (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 169)

1. Menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yan ada, dari hasil temuan engamatan lapangan.
2. Membangun pemahaman, komitmen unntu medorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
3. Mempersipakan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat

Menurut Prijono (1996) mengemukakan lima strategi pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu; (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 170)

1. Program pengembangan sumber daya manusia,
2. Program pengembangan kelembagaan lokal
3. Program pemupukan modal swasta,
4. Program pengembangan usaha produktif, dan
5. Program penyediaan informasi tepat guna.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Metode penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2019 : 16)

Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2012 : 13). Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator yang digunakan pada penelitian Efektivitas Pelaksanaan Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi menghasilkan rata-rata adalah 156 dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi termasuk pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 107 – 159. Keberhasilan *Output* dalam Pelaksanaan Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Cukup Baik. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) ini dapat membantu para anggota Gapoktan untuk berusaha pada bidang pertanian, dengan penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) langsung diberikan ke Gapoktan desa agar para petani atau anggota Gapoktan dapat lebih mudah membuat usaha produktif dengan modal Bantuan Langsung Masyarakat PUAP tersebut, meski seiring berjalannya waktu, kegiatan pengembangan ini terkendala (macet) karena faktor usaha para anggota Gapoktan kurang lancar, hal ini dikarenakan sumber daya manusia Pengelola Gapoktan masih perlu bimbingan, serta Penyuluh pertanian dan PMT harus lebih bersinergi dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) ini, Sosialisasi, koordinasi diantara pihak yang terlibat serta harus dilakukan pengawasan karena Petani belum bisa mandiri dalam memanfaatkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Keberhasilan *Outcome* dalam Pelaksanaan Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Cukup Baik, terlihat dengan petani memperoleh permodalan dari program PUAP ini, antusias para petani seperti halnya pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan pertanian, petani bergabung dengan Gapoktan, dengan ini petani-petani juga memperoleh informasi atau ilmu dalam melaksanakan kegiatan agribisnis, serta adanya program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan ini banyak petani yang mulai memanfaatkan lahan tidur miliknya untuk kegiatan usaha agribisnis, namun diharapkan pihak pengelola PUAP ini lebih meningkatkan koordinasi diantara pihak yang terlibat serta harus dilakukan pengawasan dalam memanfaatkan mengelola bantuan modal dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) ini. *Benefit* dan *Impact* dalam Pelaksanaan Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sangat Cukup Baik, terlihat dengan antusiasnya para petani, petani yang membutuhkan modal bisa mendapatkan bantuan modal dari Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan ini, serta terdapat beberapa petani yang mulai memanfaatkan lahan tidur miliknya untuk kegiatan usaha agribisnis, Gapoktan yang berfungsi sebagai tempat memperoleh informasi bagi petani dan berfungsinya Gapoktan sebagai penyalur dana pinjaman, karena dana program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) ini disalurkan melalui Gapoktan masing-masing desa, untuk diberikan kepada anggota kelompok yang membutuhkan bantuan pinjaman untuk Pengembangan Usaha Agribisnis, serta dengan petani mulai memanfaatkan lahan tidur untuk usaha agribisnis, tumbuh kembangnya kelompok tani serta kelompok tani wanita, dan juga kelompok tanimuda milenial, hal ini tentunya akan mengurangi angka pengangguran yang ada, hanya saja kurangnya Pengawasan serta koordinasi dengan pihak terkait menyebabkan kurang maksimal Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan ini



5. SIMPULAN

Hasil sebaran kuesioner mengenai Efektivitas Pelaksanaan Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan memang Cukup baiknya Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Di Kecamatan Hulu Kuantan yang menghasilkan nilai rata-rata 156 berarti berada pada interval Cukup Baik. Serta observasi lapangan yang menunjukkan Efektivitas Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sudah Cukup Baik, terlihat dengan adanya PUAP ini para petani yang mulai memanfaatkan lahan tidur miliknya untuk kegiatan usaha agribisnis yang akan memberikan penghasilan serta mengurangi angka pengangguran di Kecamatan Hulu Kuantan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Ayahanda dan Ibunda yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan Selaku dosen pembimbing II, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si Selaku dosen pembimbing I, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung
- Henry Simamora. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. Yogyakarta. STIE YKPN
- Handayani, Soewarno. 2008. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Kurniawan,agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung
- Sedarmayanti. 2006. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Siagian, Sondang P. 2002, *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Bina Aksara, Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2008, *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Bina Aksara, Jakarta
- Siswanto. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Susanto, Azhar. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta : Ghaila Indonesia
- Sutrisno, Edi. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi public Kontemporer*. Jakarta:Kencana
Ulber Silalahi, 2009, *Studi Tentang Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Bandung : Sinar
Baru Algesindo
Ulber, Silalahi. 2011. *Asas Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama
Yogi Suprayogi Sugandi, 2011. *Administrasi Publik*, Yogyakarta : Graha Ilmu

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan TA 2015